



KOTA CERDAS BERBASIS MASYARAKAT CERDAS DI KOTA BANDUNG: SEBUAH INOVASI SOSIAL

SMART CITY BASED ON SMART PEOPLE IN BANDUNG CITY: A SOCIAL INNOVATION

Yoka Pramadi^{a*}, Rusydan Fathy^a, Sheila Hauna Arifa^b

^aPusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset Inovasi Nasional; Jakarta Selatan

^bPerencanaan Wilayah Kota, Institut Teknologi Bandung; Bandung

*Korespondensi: yokapramadi@gmail.com

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 3 Januari 2022
- Artikel diterima: 25 September 2023
- Tersedia Online: 30 September 2023

ABSTRAK

Kota cerdas baik secara konsep maupun praktik memiliki kecenderungan pada determinasi teknologi digital dalam setiap programnya. Padahal, aspek lokal memiliki potensi dan masalahnya sendiri yang secara unik dapat menentukan arah kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu, artikel ini bertujuan merekomendasikan implementasi kota cerdas berbasis masyarakat cerdas dengan melihat secara holistik baik dari sisi regulasi, teknologi, dan aktor (masyarakat). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung dapat merumuskan kebijakan kota cerdas yang berakar pada potensi lokal dengan menciptakan ruang-ruang kreatif. Ruang-ruang kreatif itu pada dasarnya merupakan sebuah inovasi sosial yang relevan dalam kerangka kota cerdas.

Kata Kunci: Kota Cerdas, Masyarakat Cerdas, Ruang Kreatif, Inovasi Sosial

ABSTRACT

Smart cities, both in concept and practice, tend to heavily rely on digital technology in their various programs. However, the local aspect possesses its own potential and challenges that uniquely shape the direction of development policies and programs. Therefore, this article aims to recommend the implementation of a smart city based on smart communities, taking a holistic approach that considers regulations, technology, and society. The research methodology employed a qualitative case study approach, utilizing in-depth interviews and focused group discussions as data collection techniques. The findings indicate that Bandung can formulate smart city policies rooted in its local potential by fostering creative spaces. These creative spaces essentially represent a relevant social innovation within the framework of a smart city.

Keyword: Smart City, Smart People, Creative Space, Social Innovation

Copyright © 2023 GJGP-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa, Bandung adalah kota dengan penduduk terbanyak keempat setelah Jakarta, Surabaya, dan Medan (BPS, 2019). Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat yang jaraknya 151,7 km dengan Daerah Khusus Ibu Kota, Jakarta, Bandung memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Terletak pada ketinggian 768 m di atas permukaan laut, Bandung pada awalnya dikembangkan sebagai kota peristirahatan pada tahun 1800-an oleh pemerintah Hindia Belanda, sebagian karena pengaturan alamnya yang kaya dan iklim yang nyaman (Voskuil, 2007).

Saat ini, Bandung telah menjadi kota berskala besar dengan luas 167,3 km² dan merupakan salah satu pusat kegiatan politik, ekonomi, dan sosial terpenting di Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, Kota Bandung telah berhasil menarik investasi besar dalam dan luar negeri untuk mengembangkan berbagai

infrastruktur publik serta menghasilkan bisnis lokal seperti pariwisata, manufaktur, tekstil dan pakaian jadi, farmasi, keuangan, makanan, hiburan, dan jasa (Firman, 2009). Dorongan ekonomi, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan perluasan kota, yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan luar biasa di sektor komersial, industri, dan pendidikannya, telah membawa banyak peluang ke Bandung.

Seiring perkembangan tersebut, beberapa permasalahan kota juga muncul di dalamnya. Studi dari Tarigan et al. (2016) melaporkan beberapa masalah perkotaan kritis di Bandung, termasuk buruknya kinerja pembangunan transportasi perkotaan, sistem pengumpulan sampah, pengelolaan banjir, perbaikan kawasan kumuh, penyediaan air bersih, dan kerjasama antar pemerintah, yang dapat merusak atau menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.

Permasalahan perkotaan tersebut pada dasarnya terjadi pada kota-kota di dunia di belahan dunia lain. Urbanisasi menjadi salah satu transformasi dan dinamika urban secara global yang menyebabkan hal tersebut. Di samping itu, masyarakat dan kota di dunia memasuki transformasi dan dinamika menuju industry 4.0 dan masyarakat 5.0 dimana perkembangan teknologi yang pesat menjadi karakteristiknya. Merespon dua proses yang terjadi secara global—yakni urbanisasi dan perkembangan teknologi, kota-kota di dunia memiliki agenda menuju kota cerdas (*Smart City*). Kota cerdas dapat dilihat sebagai proyek pembangunan perkotaan melalui pemanfaatan *internet of thing* dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi berbagai problematika urban dengan menciptakan berbagai bentuk inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan.

Termasuk bagi kota Bandung, pemerintah Kota Bandung mencoba menyelesaikan berbagai permasalahan kota melalui konsep kota cerdas. Dalam laman smartcity.bandung.go.id dituliskan dengan jelas harapan tersebut bahwa Bandung Kota Cerdas adalah kota yang berfungsi secara maksimal dalam mengelola berbagai sumber daya kota secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan problematika kota. Dengan menggunakan solusi yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan dimana teknologi menjadi pendorong harapannya dapat tercipta solusi tersebut. Selain itu, dengan ditopang infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang siap untuk memberikan layanan kota sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup warganya menuju Bandung yang nyaman dan dicintai. Menurut Hasanuddin (2021), kondisi tata kelola pemerintahan cerdas meliputi konsepsi pengembangan kota cerdas, komitmen kepala daerah, dan struktur unit pengelola, serta keterbukaan dan kolaborasi antar *stakeholders*.

Pemerintah Kota Bandung memiliki visi untuk menjadikan kotanya *livable* dan *lovable*. *Liveable* adalah Kota Bandung yang berfungsi secara maksimal sehingga nyaman dan layak dihuni oleh warganya. *Loveable* adalah Kota Bandung yang dicintai, membuat warganya nyaman dan memberikan segala yang terbaik untuk Bandung. Pemerintah Kota Bandung dirasa perlu melakukan penyesuaian arah kebijakan kota cerdas. Implementasi Bandung kota cerdas tidak bisa dilakukan sekedar pada pembangunan infrastruktur teknologi—berfokus pada *internet of things* (IoT), big data, dan *artificial intelligence*. Kota cerdas bukan hanya sebagai euphoria dan jargon semata. Kota cerdas bukan hanya *template* yang mana penerapannya bisa diseragamkan dari satu kota ke kota yang lain. Aspek sosial menjadi penting dalam implementasi kota cerdas karena menangkap dua hal: pertama masyarakat (*human* dan *social capital*—pengembangan kapasitas) dan yang kedua yaitu lokalitas (potensi dan masalah lokal). Baiknya sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi tidak berguna bila masyarakat tidak mau berubah menjadi lebih baik (Fuady et.al, 2021). Merujuk Lara et al. (2016: 10), Kota cerdas adalah “komunitas yang secara sistematis mempromosikan kesejahteraan untuk semua anggotanya, dan cukup fleksibel untuk proaktif dan berkelanjutan menjadikan tempat yang semakin baik untuk hidup, bekerja dan bermain”. Artinya, masyarakat merupakan basis dari proses dan tujuan agenda kota cerdas. Masyarakat merupakan aktor pembangunan yang aktif dan kreatif untuk mendesain kotanya.

Untuk itulah artikel ini berargumen bahwa kota cerdas di Indonesia tidak dapat hanya menekankan pada tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi semata—*e-government*. Kota cerdas Indonesia nampaknya masih terjebak pada apa yang dikatakan Mora et al. (2019) sebagai *techlogical-led*. Itu terlihat pada Kota Bandung yang memiliki fokus kota cerdas dengan menekankan pada unsur teknologi digital seperti memprioritaskan diskursus *big data* dan bagaimana menggunakan itu untuk menciptakan layanan

publik berbasis aplikasi atau web. Padahal, hal mendasar yang menjadi penting, bukanlah banyaknya layanan berbasis teknologi digital, melainkan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya sekaligus merupakan bentuk partisipasi aktif sebagai warga kota. Sebagaimana Foth (2018) telah menjelaskan bahwa tingkat partisipasi warga kota dalam konteks kota cerdas dapat berupa warga sebatas hanya sebagai penduduk, konsumen, peserta, atau *co-creator*. Implementasi kota cerdas Kota Bandung cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek penerima manfaat. Dengan kata lain, berdasarkan Foth (2018), tingkat partisipasi dan kolaborasi warga belum berada pada posisi *co-creator*. *Co-creator* adalah menekankan pada masyarakat bukan hanya sebagai user melainkan juga sebagai inisiator, *activator*, atau *local champion*. Dalam perkembangannya kota cerdas bukan semata-mata proses restrukturisasi tata kelola pemerintahan melainkan juga proses yang mengedepankan aspek pemberdayaan.

Kota Bandung memiliki berbagai potensi yang relevan dalam agenda pengembangan kota cerdas. Sumber daya manusia Kota Bandung memiliki beragam bentuk inovasi kreatif yang bukan hanya berpotensi mencapai keuntungan ekonomi melainkan juga manfaat sosial-budaya. Artikel ini melihat berbagai inovasi tersebut sebagai sebuah inovasi sosial yang memiliki bentuk dan prosesnya sendiri. Pada dasarnya, inovasi sosial merupakan konsep multidimensi dan multiperspektif yang relevan dalam analisis implementasi kota cerdas. Dalam tradisi teoritik ilmu sosial dan humaniora, persinggungan antara dimensi ekonomi dan sosial sering menjadi pembahasan utama termasuk dalam hal ini yaitu isu inovasi. Inovasi sosial menjadi konsep yang dipandang sebagai alternatif dari inovasi yang bersifat ekonomi semata. Hal itu misalnya sebagaimana dinyatakan oleh Lisetchi dan Brancu (2014: 87), inovasi sosial mengubah permasalahan sosial kritis menjadi peluang dengan melibatkan secara aktif aktor komunitas. Dalam konteks perubahan dan inovasi, inovasi sosial bermakna sebagai perubahan di dalam hubungan sosial, melibatkan cara-cara baru dalam melakukan, mengorganisasikan, mengetahui dan membimbing (Avelino, et al, 2019: 197). Dengan kata lain, artikel ini melihat bahwa inovasi sosial menitikberatkan pada bentuk, karakteristik, dan proses secara sosial.

Pada gilirannya, inovasi sosial berkaitan erat juga dengan konversi hubungan sosial menjadi manfaat sosial dan keuntungan ekonomi. Oleh sebab itu, proses inovasi sosial sebagaimana konteks perubahan juga berfokus pada kolaborasi antar sektor dalam menghasilkan produk, jasa, atau cara-cara baru. Namun demikian, inovasi sosial tentunya melihat eksistensi—apa yang disebut oleh Portales (2019) sebagai—sektor ketiga dan sektor informal. Kedua sektor tersebut menurut Portales (2019), merujuk pada keberadaan organisasi dan komunitas akar rumput. Mengikutsertakan kedua sektor tersebut dapat dikatakan sebagai upaya meminimalisasi terjadinya marginalisasi dalam regulasi yang hendak diimplementasikan. Hal itu juga dapat menjamin hak-hak warga kota untuk secara aktif dan sadar terlibat dalam membangun kotanya. Sebagaimana argumen Iwamoto dan Cancado (2020), bahwa inovasi sosial pada dasarnya merupakan jalan menuju emansipasi yang setidaknya mencakup 3 aspek: kebebasan berpolitik, kebebasan transisi dan pasar dan kesempatan sosial. Inovasi sosial itu sendiri dapat bervariasi ke dalam berbagai bentuk seperti inovasi sosio-teknikal, inovasi sosio-organisasional, inovasi sosio-etik, inovasi sosio-ekologi, dan inovasi sosio-kultural (Wigboldus, 2017).

Berangkat dari definisi dan cakupan konsep inovasi sosial, artikel ini memahami bahwa inovasi sosial dapat menjadi proses dan tujuan di dalam implementasi kota cerdas di Kota Bandung. Hal itu mengingat keragaman potensi yang dimiliki oleh aktor-aktor di Kota Bandung. Namun demikian aktor-aktor kreatif dengan berbagai inovasinya seakan terlepas dari kerangka regulasi kota cerdas di Kota Bandung. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengurai bagaimana Bandung kota cerdas dilihat dari sisi holistik yakni regulasi, teknologi, dan aktor, serta tantangan ke depan. Selain itu melihat bagaimana ruang kreatif sebagai bentuk inovasi sosial dimunculkan dalam konteks kota cerdas di Kota Bandung. Artikel ini juga mencoba membuat rekomendasi alur berpikir kota cerdas berbasis masyarakat cerdas di Kota Bandung berdasarkan kerangka berpikir dan analisis data tersebut.

2. DATA DAN METODE

2.1. Pengumpulan Data

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan yang telah dibahas pada pendahuluan, maka landasan teoritik kota cerdas dalam artikel ini berfokus pada 3 elemen inti meliputi unsur regulasi, teknologi, dan aktor (masyarakat). Namun pada praktiknya, artikel ini juga lebih memusatkan perhatiannya kepada unsur aktor yang dalam hal ini diasosiasikan sebagai kelompok masyarakat (komunitas). Penekanan pada konteks tersebut adalah bagaimana masyarakat dapat dilibatkan secara penuh dalam konstelasi inisiasi kota cerdas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama, yakni dengan studi literatur yang terkait dengan kota cerdas di Indonesia, khususnya beberapa program kota cerdas yang sudah berjalan di kota dan kabupaten di Indonesia. Kemudian, dilakukan pengumpulan data mengenai rencana induk (*masterplan*) dan regulasi yang terkait kota cerdas di Kota Bandung, informasi yang beredar di media massa, universitas dan media lainnya.

Data lainnya yang juga penting adalah data dari narasumber-narasumber kunci. Narasumber kunci dalam hal ini yaitu pemimpin kota, perangkat daerah, para akademisi, dan tokoh masyarakat atau komunitas yang telah mulai menerapkan tata kelola yang berkelanjutan dan cerdas. Informasi yang diperoleh dari narasumber-narasumber kunci ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pengalaman dan pemahaman mereka terhadap konsep kota cerdas dan bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Melalui wawancara dan interaksi dengan narasumber-narasumber kunci (sepaimana dijelaskan pada Tabel 1), data ini menjadi sumber berharga untuk mendukung kesimpulan penelitian dan memberikan rekomendasi yang lebih kaya dan berdasarkan pada pengalaman nyata di lapangan.

Dengan metode pertemuan dalam bentuk diskusi terfokus (FGD) dengan para pemangku kepentingan di Kota Bandung (sepaimana dijelaskan pada Tabel 1) diharapkan mendapatkan pemahaman konsep pengembangan kota cerdas di Kota Bandung. Narasumber dari pihak swasta atau komunitas memberi masukan kepada strategi tata kelola. Dari sisi masyarakat, dalam rangka mendorong terbentuknya masyarakat cerdas, warga kota yang potensial dari berbagai kalangan diwawancarai, sehingga diperoleh permasalahan dalam penggunaan teknologi digital untuk mewujudkan kota cerdas. Asumsi yang dibangun, keberhasilan ekosistem teknologi digital di bidang tata kelola kota didukung oleh para penggunanya, yakni warga kota yang melek teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi tersebut.

Tabel 1. Penentuan Informan

No	Kategori Informan	Informasi	Teknik Pengumpulan Data	Durasi Pengumpulan Data
1	Pemimpin Kota 3 Informan (Camat Coblong, Kepala Bappelitbang dan Kepala Seksi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo)	Kebijakan dan program kota cerdas dari sisi pemerintah kota serta pandangan mereka mengenai konsep kota cerdas.	FGD dan Wawancara	FGD dilakukan pada tanggal 10 Juni, 2021 dengan durasi sekitar 120 menit.
2	Akademisi 3 Informan (Direktur Common Room Bandung dan Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung)	Pemahaman dan perkembangan teoritis terkini mengenai kota cerdas.	FGD dan Wawancara	Wawancara mendalam dilakukan sepanjang periode pengumpulan data
3	Praktisi dan Komunitas 6 Informan (Ketua Bandung Creative City Forum, Ketua Posyantek Kecamatan Coblong, Ketua Kampung Kreatif Dago Pojok, Seniman Wayang Golek di Kampung Kreatif Dago Pojok,	Pengalaman dan pembelajaran dalam kegiatan yang relevan dengan implementasi kota cerdas. Inovasi sosial yang relevan dengan implementasi kota	FGD dan Wawancara	di lapangan tanggal 25 Mei – 11 Juni 2021 dengan durasi sekitar 60-120 menit pada masing-masing informan.

No	Kategori Informan	Informasi	Teknik Pengumpulan Data	Durasi Pengumpulan Data
	Ketua Relawan TIK Kota Bandung, dan Seniman Kampung Akustik Cicadas)	cerdas serta imajinasi mereka tentang kota cerdas.		

2.2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di Kota Bandung. Cresswell (1998) menyatakan bahwa studi kasus (*case study*) adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistem yang terbatas” (*bounded system*) pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. Secara umum, *case study* atau studi kasus didefinisikan sebagai sebuah studi empiris yang menginvestigasi fenomena kontemporer di dalam konteks riilnya, dimana tidak ada batasan yang jelas antara fenomena dan konteks tersebut (Yin, 2018).

Analisis yang dipakai adalah deskriptif analitis dengan memasukkan variabel-variabel dari masyarakat cerdas dan teknologi digital sebagai elemen analisisnya ke dalam kota cerdas. Juga dilakukan analisis data digital berupa transkrip FGD dan juga wawancara mendalam untuk bisa mendapatkan pemetaan *stakeholders*. Selanjutnya, deskripsi analitis digunakan untuk mengkategorikan semua data yang diperoleh ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan penelitian. Ini dilakukan agar hasil analisis dapat disusun secara sistematis dan menghasilkan alur pembahasan yang terstruktur. Sebagai catatan penting dalam artikel ini bahwa ketika berbicara tentang variabel yang terkait dengan masyarakat cerdas, sebenarnya merujuk pada konsep kohesi dan kesejahteraan komunitas yang menjadi bagian integral dari variabel-variabel lain dalam konsep kota cerdas, seperti kebijakan dan teknologi digital. Dengan demikian, analisis ini menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana konsep kota cerdas beroperasi dan dampaknya pada kohesi dan kesejahteraan komunitas.

Selain itu, artikel ini juga melakukan analisis *stakeholder* dengan memetakan *power* dan *interest* pada masing-masing aktor. Reed et.al. (2009) mendefinisikan analisis *stakeholder* sebagai sebuah proses yang melibatkan langkah-langkah berikut: 1) Mendefinisikan aspek sosial dan alam dari fenomena yang dipengaruhi oleh suatu keputusan atau tindakan. 2) Mengidentifikasi individu, kelompok, dan organisasi yang terkena dampak atau memiliki potensi untuk memengaruhi bagian-bagian dari fenomena tersebut. Ini dapat mencakup entitas non-manusia, benda mati, dan generasi mendatang. 3) Memprioritaskan individu dan kelompok ini untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu metode populer menggunakan *power* dan *interest* untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan menjadi “*key players*”, “*context setters*”, “*subjects*” dan “*crowd*”. Dalam matriks *power* dan *interest*, *Key players* adalah *stakeholder* yang penting karena mereka berminat dan berpengaruh besar terhadap suatu fenomena. *Context setters* memiliki pengaruh besar tetapi minat yang lebih rendah, yang bisa menjadi risiko yang perlu diawasi dan dikelola. Sementara itu, ada *subjects* dengan minat tinggi tetapi pengaruh yang terbatas. Meskipun mereka mendukung program, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan besar untuk berdampak, meskipun mereka dapat mempengaruhi melalui aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan *crowd* adalah *stakeholder* yang memiliki sedikit minat atau pengaruh terhadap hasil yang diinginkan, dan tidak perlu mempertimbangkan mereka secara mendalam atau berinteraksi dengan mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bandung Kota Cerdas: Kebijakan Eksisting dan Problematikanya

Regulasi terkait kota cerdas di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*) Periode 2018-2023. Tujuan dari Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Masterplan Bandung Smart City*) periode 2018-2023 adalah:

- a) mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;
- b) mengembangkan Bandung Kota Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi kota cerdas (*smart governance, smart economy, smart society, smart branding, smart living, dan smart environment*);
- c) menetapkan prioritas pembangunan kota cerdas untuk jangka waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023; dan
- d) mengelola pengembangan kota cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

Secara infrastruktur Bandung Command Center merupakan salah satu ikon kota cerdas di Kota Bandung. Dilengkapi dengan teknologi yang canggih, operasional Bandung Command Center ditujukan untuk menyempurnakan pelayanan publik dari Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat. Dibangun sejak tahun 2014 dan resmi beroperasi pada tanggal 19 Januari 2015, Bandung Command Center menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Bandung dalam hal pelayanan publik. Selain itu, Bandung Command Center juga merupakan salah satu kunci penting dalam upaya Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung Kota Cerdas.



Sumber: smartcity.bandung.go.id dan Dokumentasi Penulis, 2021

Gambar 1. Bandung Command Center

Namun dari hal tersebut di atas terlihat jelas bahwa Bandung Kota Cerdas berfokus pada *smart governance* sebagai aset kota cerdas (*smart city assets*)—Input. Berbagai pengembangan aplikasi berbasis teknologi digital diperuntukkan untuk layanan publik. Teknologi, dengan kata lain, menjadi drivers utama sementara unsur *community/people* menjadi penerima tujuannya (penerima manfaat dari berbagai aplikasi layanan publik yang dikembangkan). Kota cerdas Bandung juga memberikan perhatian lebih kepada pengumpulan dan integrasi *big data*. Data menjadi penting untuk menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat Kota Bandung. Lebih jauh, kota cerdas Bandung bertujuan menjadikan Kota Bandung sebagai ruang kreatif bagi kegiatan sosial ekonomi warganya—wadah UMKM, Bandung ICONIC, *Start Up* dan lain sebagainya.

Interelasi antara teknologi dan regulasi kota cerdas Bandung termanifestasikan pada *smart governance*—integrasi data untuk layanan publik. Namun, terdapat gap antara interelasi teknologi dan regulasi tersebut dengan unsur komunitas di Kota Bandung. Berkenaan dengan gap tersebut, dapat dilihat dari dua hal yaitu 1) Gap antara komunitas dengan teknologi dan 2) Gap antara komunitas dengan regulasi. Masalah-masalah umum seperti sinergitas, koordinasi, data, keberlanjutan—*stakeholders analysis*.



Sumber: smartcity.bandung.go.id

Gambar 2. Kluster Bandung Kota Cerdas

Menurut analisis Pemerintah Kota Bandung konsep smart government, dengan e-Gov sebagai intinya merupakan fondasi *smart governance* pada kota cerdas. Oleh karena itu, untuk mendukung terwujudnya Bandung Kota Cerdas, perlu diwujudkan *Bandung Smart Government* terlebih dahulu.



Sumber: *Masterplan Bandung Kota Cerdas, 2017*

Gambar 3. Posisi *Smart Governance*, *Smart Government* dan *e-Government (e-Gov)* dalam Kota Cerdas Bandung

Seperti yang tertuang dalam Buku Masterplan Bandung Kota Cerdas, *Bandung smart government* ini merupakan salah satu wujud nyata sarana untuk mendukung pertumbuhan Kota Bandung menuju kota cerdas. Sebagai aktor utama yang menggerakkan *smart government*, perlu diperhatikan apa saja yang menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah. Diidentifikasi tiga peran utama pemerintah yaitu: 1) Memberikan layanan untuk kesejahteraan masyarakat; 2) Sebagai regulator untuk meningkatkan daya saing kota; 3) Menyelenggarakan pemerintah yang aktif dan efisien.

Smart government yang menjadi tumpuan Pemerintah Kota Bandung, melihat masyarakat sebagai komponen penting. Hal itu signifikan dalam diskursus implementasi kota cerdas berbasis masyarakat cerdas. Artinya melihat sejauh mana masyarakat mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi bagi kemudahan kehidupan mereka sehari-hari. Hal itu tentu bergantung pada komitmen pemerintah kota dalam memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan dan program kota cerdas yang dirumuskan. Inovasi sosial menjadi praktik yang lebih penting dalam diskursus tersebut. Dengan kata lain, kota cerdas tidak berfokus hanya kepada penyediaan infrastruktur teknologi oleh pemerintah kota untuk memfasilitasi masyarakat. Lebih penting yaitu peran pemerintah kota menerapkan kebijakan dan program kota cerdas yang lebih kontekstual. Itu terjadi ketika pemerintah kota memfasilitasi dan mengafiliasi kemunculan-kemunculan inovasi-inovasi sosial yang muncul di akar rumput (masyarakat).

Berkenaan dengan itu, pada dasarnya Bandung Kota Cerdas telah berupaya melihat potensi-potensi di masyarakat. Potensi-potensi tersebut berkaitan dengan ruang-ruang kreatif yang ada di Kota Bandung. Ruang kreatif itu merupakan ruang sosial dan ekonomi di tingkat lokal dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ruang kreatif di Kota Bandung dipandang sebagai bentuk inovasi sosial masyarakat yang coba difasilitasi dalam kebijakan kota cerdas.

3.2. Ruang Kreatif dalam Konteks Kota Cerdas

Ruang-ruang kreatif merupakan narasi yang diangkat dari hasil penelitian ini. Ruang kreatif tersebut merujuk pada makna sebuah wadah baik nyata maupun maya bagi aktor masyarakat atau komunitas di Kota Bandung yang mana kegiatannya bersinggungan dengan teknologi digital dan relevan dengan praktik kota cerdas. Hasil analisis melihat bahwa penciptaan ruang-ruang kreatif sangat relevan dalam implementasi Bandung Kota Cerdas. Hal itu terutama berkenaan dengan proses pembentukan Masyarakat cerdas sebagai basis dari kota cerdas. Dari sisi tinjauan kebijakan terdapat relevansi antara pengelolaan ruang kreatif bagi ekonomi lokal dengan kota cerdas.

Tinjauan kebijakan tingkat provinsi yang relevan dengan pengelolaan ruang kreatif dalam ekonomi lokal di Kota Bandung terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. RTRW Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Perda No. 22 Tahun 2010 menjelaskan bahwa PKN merupakan kepanjangan dari Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. RTRW Provinsi Jawa Barat juga menyatakan bahwa sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP KK Cekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Fokus pengembangan dalam Cekungan Bandung salah satunya adalah Kota Bandung, yang selanjutnya diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010, RPJPD Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 RPJM Daerah kedua (2008-2013) di bidang IPTEK diarahkan untuk pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam menunjang fokus dan akselerasi pembangunan ekonomi, pembangunan SDM, dan sarana prasarana yang dibutuhkannya dalam mendukung peningkatan kualitas insani yang berdaya saing serta berbudaya ilmu (*science*) dan teknologi, serta perwujudan layanan pemerintahan provinsi berbasis teknologi informasi (*cyber province*). RPJMD Jawa Barat tahun 2018-2023, menyampaikan data bahwa kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara merupakan barometer keberhasilan pariwisata Jawa Barat. Dengan kekayaan alam, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif di berbagai wilayah Jawa Barat, menjadi daya tarik yang besar untuk industri pariwisata. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2013 berjumlah 1.794.401 orang wisatawan dan sejak tahun 2014 jumlahnya terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 4.984.035 orang.

Tinjauan kebijakan tingkat kota yang relevan dengan pengelolaan ruang kreatif dalam ekonomi lokal di Kota Bandung terdiri atas Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Rencana Induk Bandung Kota Cerdas. Rencana Induk Bandung Kota Cerdas Tahun 2018-2023 diselenggarakan berdasarkan asas lima asas, yaitu asas keterpaduan, efektif, efisien inklusif, dan partisipatif. *Masterplan* ini juga memiliki tujuan yang salah satunya adalah mengembangkan Bandung Kota Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi Kota Cerdas (*smart governance, smart economy, smart society, smart branding, smart living, dan smart environment*).

Dua kebijakan di tingkat kota tersebut menjadi pondasi dalam membangun argumentasi awal bahwa implementasi Kota Cerdas di Kota Bandung dapat bertumpu pada penciptaan ruang-ruang kreatif yang memanfaatkan teknologi digital yang bertujuan menjadi wadah bagi komunitas untuk berkembang dan meningkatkan kohesi sosial mereka.

Pengelolaan ruang kreatif dalam konteks tersebut ditunjang oleh arahan, visi, misi, strategi, dari kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan di skala nasional, provinsi, serta kota. Dalam skala nasional, pemerintah nasional mengarah kepada pembangunan seluruh wilayah di Indonesia yang menekankan pada kesejahteraan ekonomi dan peningkatan kemampuan digital. Untuk konstelasi Jawa Barat, Cekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa,

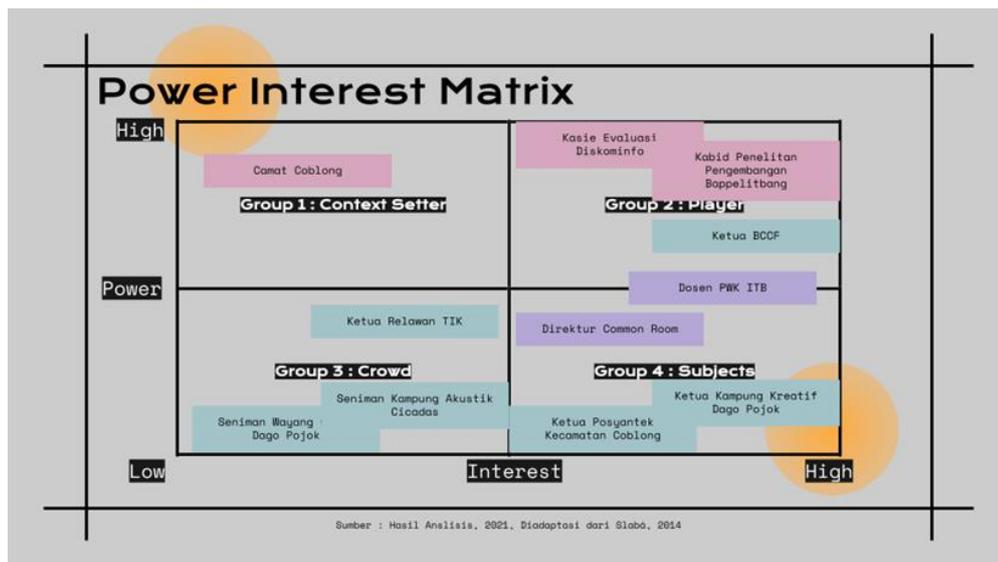
pariwisata, dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Dilengkapi dengan kebijakan Kota Bandung, secara spesifik hingga memiliki Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*).

Oleh karena itu, ditetapkan kebijakan yang secara khusus membahas tentang ruang kreatif, kota cerdas, ekonomi lokal, serta kapasitas masyarakat cerdas di Kota Bandung sebagai acuan dilakukannya analisis *stakeholders* berupa peningkatan, penyediaan infrastruktur, serta mendukung kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat cerdas di Bandung Kota Cerdas. Terkait dengan eksistensi berbagai aktor dalam konteks Bandung Kota Cerdas, penulis kemudian melakukan analisis *stakeholder* dan membuat matriks. Hal ini menjadi penting, untuk memberikan gambaran awal yang akan dianalisis lebih lanjut melalui artikel ini. Matriks *stakeholders* tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi sudut pandang atau persepsi *stakeholders* terhadap variabel pengamatan, yaitu pengetahuan, kekuatan, kepentingan, dan pengaruhnya dalam pengelolaan ruang kreatif untuk pengembangan ekonomi lokal Kota Bandung. Identifikasi persepsi ini dilakukan dengan urutan sebagai berikut, pertama adalah menetapkan gagasan spesifik topik penelitian, kemudian penentuan *stakeholders* kunci sebagai narasumber wawancara, pengambilan data sekunder dan data primer baru kemudian persepsi *stakeholders* ini akan menjadi acuan dalam kuantifikasi analisis matriks *stakeholder* yang diharapkan. (Adaptasi dari Schmeer, 2000).

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada 11 *stakeholders* yang mewakili instansinya masing-masing, mulai dari pemerintahan daerah, komunitas masyarakat, dan akademisi. *Stakeholder* masing-masing memberikan persepsinya terhadap pengelolaan ruang kreatif dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Bandung terbagi atas:

- a) *Stakeholders* yang termasuk ke dalam kategori pemerintah daerah Kota Bandung adalah Camat Coblong, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kota Bandung, dan Kepala Seksi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Bandung
- b) *Stakeholders* yang termasuk ke dalam kategori komunitas masyarakat adalah Ketua Bandung Creative City Forum, Ketua Posyantek Kecamatan Coblong, Ketua Kampung Kreatif Dago Pojok, Seniman Wayang Golek di Kampung Kreatif Dago Pojok, Ketua Relawan TIK Kota Bandung, dan Seniman Kampung Akustik Cicadas
- c) *Stakeholders* yang termasuk akademisi terdiri atas Direktur Common Room Bandung dan Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung.

Hasil analisis yang ditampilkan dalam matriks (Gambar 4), bahwa *stakeholder* dalam kategori komunitas berada posisi yang beragam. Dapat terlihat dari hasil matriks tersebut, bahwa *stakeholder* yang tergolong ke dalam kategori masyarakat cenderung berada di posisi grup 3 dan 4 dengan kesamaan kepemilikan *power low*. Kepemilikan *power* yang tinggi dan *interest* tinggi pada grup satu berada pada *stakeholder* pemerintah yaitu Kepala Seksi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Bandung dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kota Bandung.



Sumber: Analisis penulis Diadaptasi dari Slaba 2014

Gambar 4. Power Interest Matrix Stakeholder Bandung Kota Cerdas

Relawan TIK dan juga seniman-seniman di Bandung, baik seniman wayang, tari, musik akustik, berada pada kelompok stakeholder pengikut lain (crowd) dimana memiliki kepentingan rendah dan kekuatan yang kecil terhadap proyek dalam hal ini program kota cerdas. Keberadaan kelompok tersebut tidak terlalu memberikan pengaruh signifikan, tetapi keberadaannya dapat memperkuat masyarakat agar bersedia dalam pengelolaan ruang kreatif untuk pengembangan ekonomi lokal. Beberapa pertanyaan kritis dari matrik tersebut ialah mengapa eksistensi komunitas lokal berada pada kategori *power* dan *interest* yang rendah? Hal itu dapat mungkin terjadi ketika Bandung Kota Cerdas cenderung bersifat *top down* serta kurang maksimal mengafirmasi konteks lokal di masyarakat. Padahal, posisi komunitas-komunitas kreatif sebagai salah satu penggerak Kota Cerdas sangatlah signifikan terutama sebagai basis dari pembentukan masyarakat cerdas. Masyarakat merupakan aktor lokal yang berada pada akar rumput serta memiliki potensi-potensi lokal yang unik. Sangat dimungkinkan, dengan penggalian data yang lebih intensif, kita mampu menangkap preferensi makna dan praktik kota cerdas dari sudut pandang mereka. Penulis berargumen bahwa keberhasilan dalam menggali dan mengafirmasi sudut pandang mereka akan memberikan rona berbeda bagi implementasi kota cerdas di Kota Bandung yang tentunya diharapkan menjadi lebih relevan.

Merujuk pada Mora et al. (2019) kondisi demikian merupakan representasi dari kota cerdas yang lebih menekankan pada *technological-led*. Dengan kata lain, implementasi kota cerdas dapat hanya berfokus pada instalasi jaringan internet, penciptaan berbagai aplikasi, dan digitalisasi layanan publik semata. Namun demikian, hal itu belum mampu diakses atau dimanfaatkan seluruh warga kota secara maksimal. Kondisi penerapan kebijakan yang bersifat *top down* juga dapat merefleksikan tingkat partisipasi dan kolaborasi warganya—sebagaimana dinyatakan Foth (2018)—hanya sebagai *user*. Dengan kata lain masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek penerima manfaat. Menurut Foth (2018) tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam kaitannya dengan teknologi digital sebenarnya mampu menjadi *co-creator* yakni menekankan pada masyarakat sebagai inisiator, *activator*, atau *local champion*.

3.3. Masyarakat Cerdas sebagai Basis: Aktor, Potensi Lokal, dan Inovasi Sosial

Ruang kreatif sebagai bentuk inovasi sosial di Kota Bandung berkelindan dengan industri ekonomi kreatif. Pengembangan industri ekonomi kreatif itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Transformasi dan dinamika kota yang terjadi saat ini, sebagaimana diketahui menuju pada *informational city* dan ekonomi informasi (Castells, 1989; 1990). Selain itu, masyarakat kini bertransformasi menuju masyarakat

jaringan yang disebabkan oleh teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang (Castells, 1996). Pada akhirnya, segala bentuk inovasi sosial—terkhusus dalam konteks kota cerdas, sangat berkaitan dengan inovasi sosial yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Namun demikian, kita inovasi sosial dapat juga dilihat secara luas. Artinya, tidak semata-mata bertumpu pada eksistensi teknologi informasi dan komunikasi. Esensi inovasi sosial juga dapat mengakar pada segala bentuk potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat. Hal itu mencakup keragaman sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Artinya, melihat sejauh mana masyarakat mewacanakan dan mengembangkan kembali aspek sosial dan budaya tersebut dalam transformasi dan dinamika kota saat ini. Dalam prosesnya, unsur teknologi mungkin masih minim atau bahkan tidak sama sekali menyertai proses itu. Temuan riset ini mencoba mengidentifikasi perbedaan kondisi-inovasi sosial yang mungkin terjadi di Kota Bandung.

Kampung Dago Pojok Kreatif Kota Bandung menjadi salah satu Kampung yang mendapat perhatian besar dari berbagai stakeholder. Berbagai upaya pengembangan Kampung Dago Pojok sebagai kampung kreatif telah mengalami serentetan dinamika. Di bawah inisiatif aktor lokal, Rahmat Jabbaril, Kampung Dago pojok menjadi salah satu *role model* bentuk kampung kreatif di Kota Bandung. Telah banyak kajian yang melihat kampung Dago Pojok telah berhasil mengangkat nilai-nilai sosial budaya serta memberikan keuntungan ekonomi bagi warganya. Berbagai kegiatan seni budaya, keberadaan sanggar-sanggar budaya, dan aktifitas-aktifitas seni lainnya yang dilakukan aktor lokal di Kampung ini merupakan representasi pembentukan masyarakat cerdas itu sendiri dengan sendirinya. Tentunya, proses tersebut akan lebih efektif ketika diwadahi didukung oleh komponen penggerak lain di dalam kota cerdas, yaitu teknologi dan kebijakan.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021

Gambar 5. Kampung Kretaif Dago Pojok

Bukan hanya Rahmat Jabbaril, Kampung Kreatif Dago Pojok memiliki aktor-aktor lain yang berurusan dengan proses pembentukan masyarakat cerdas. Beberapa diantaranya adalah Kang Nanang yang memiliki sanggar wayang dan Kang Gibran yang aktif berkegiatan seni, baik seni rupa maupun musik serta aktif bermedia sosial dan menajdi selebgram. Kang Nanang di satu sisi merupakan representasi manusia yang mencintai budaya serta bercita-cita untuk meneruskannya kepada generasi muda. Pandangan filosofis Kang Nanang tentang budaya yang bersifat optimis juga berlaku pada pandangannya tentang kemajuan teknologi dan perkembangan kampong. Kang Gibran di sisi lain, merupakan representasi pemuda kreatif yang menyelaraskan seni dan teknologi. Kedua aktor tersebut (bersama dengan aktor lainnya) tentu dapat menjadi kekuatan Kampung Dago Pojok yang relevan dengan agenda Bandung Kota Cerdas.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021 dan Akun Instagram @gibranjibb

Gambar 6. Aktor Lokal Kampung Kreatif Dago Pojok

Bukan hanya Rahmat Jabbaril, Nanang, dan Gibran dari Kampung Dago Pojok, Kota Bandung memiliki aktor dan potensi lokal lain yang dapat diselaraskan dalam pengembangan kota cerdas. Salah satunya adalah Kang Ganjar Noor dari Kampung Akustik Cicadas. Kang Ganjar merupakan seniman (pemusik) yang produktif dalam menciptakan karya-karyanya serta terafiliasi dengan komunitas-komunitas terkait. Kang Ganjar juga merupakan rekan Kang rahmat dan menjadi salah satu aktor kunci dalam pengembangan Kampung Kreatif Akustik Cicadas.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021

Gambar 7. Aktor Lokal Kampung Kreatif Cicadas

Namun demikian, sama halnya dengan Kampung Kreatif Dago Pojok, Kampung Akustik Cicadas juga mengalami dinamikanya. Terlebih pandemi Covid-19 agaknya menjadi salah satu kondisi eksternal yang mempengaruhi berbagai kegiatan di beberapa Kampung Kreatif di Kota Bandung. Namun demikian, hal itu tidak menjadi hambatan mobilitas aktor-aktor lokal tersebut. Termasuk Kang Ganjar yang tetap aktif bermusik di Kota Bandung, baik dilakukan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan komunitasnya.

Berbicara mengenai aktor dan potensi lokal Kota Bandung dalam agenda pengembangan Kota Cerdas tidak terbatas pada lingkup kampung kreatif. Beberapa aktor lain cukup memberikan variasi bagi Kota Bandung. Beberapa di antaranya adalah Nur Islami Javad, yang fokus dalam pengembangan *start up* dan ekonomi lokal Kota Bandung. Nur Islami Javad terafiliasi dalam beberapa komunitas misalnya Business Initiative Movement (@bimindonesia.id), komunitas startup Bandung (@startupbandung), konsultan IT Kota Bandung (@sharing_vision), dan konsultan investasi crypto Kota Bandung (@gajahcrypto).



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021

Gambar 8. Aktor Lokal Lain yang Mendukung Bandung Kota Cerdas

Selain aktor-aktor yang telah disebutkan, proses pembentukan masyarakat cerdas juga dilakukan aktor-aktor di dalam komunitas yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah seperti Relawan TIK Kota Bandung dan Pos Layanan Teknologi di tiap Kecamatan di Kota Bandung. Selain itu, aktor kunci lain dari sisi komunitas yang berada pada kategori *high interest* dan *power* adalah Bandung Creatif City Forum (BCCF). Posisi BCCF berada pada level rentang tengah (*mid-range*) yang memiliki sumber daya dan informasi lebih untuk melakukan mobilatas ke struktur di atasnya maupun ke akar rumput.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021

Gambar 9. Kantor BCCF

BCCF sendiri merupakan komunitas kreatif kota Bandung yang menjadi wadah bagi komunitas-komunitas kreatif di Kota Bandung dalam mengupayakan pengembangan ekonomi kreatif dan wirausaha lokal. BCCF juga memiliki jaringan yang luas, salah satunya di tingkat nasional dengan Indonesia Creatif City Forum (ICCN). BCCF juga melakukan pengembangan kampung-kampung kreatif di Kota Bandung bersama aktor-aktor lokal dan pemerintah kota. Pada prinsipnya, BCCF dapat membantu perencanaan dan perbaikan infrastruktur Kota serta relevan dan signifikan sebagai salah satu penggerak (*driver*) kota cerdas di Kota Bandung.

Aktivitas-aktivitas ini meliputi pembuatan ruang kolaboratif untuk wirausahawan muda, pengembangan program pelatihan teknologi bagi warga masyarakat, kampanye partisipatif untuk kesadaran lingkungan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan publik. Kegiatan-kegiatan inovasi sosial ini menunjukkan komitmen dan upaya aktif dari masyarakat, pemimpin kota, dan perangkat daerah untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang berdampak positif bagi seluruh kota. Dengan mengidentifikasi dan memahami aktivitas-aktivitas ini, artikel ini berharap dapat

memberikan masukan berharga bagi perencanaan dan pengembangan lebih lanjut dalam mewujudkan visi Kota Bandung sebagai kota cerdas berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari beberapa kegiatan aktor-aktor yang terlibat dalam ruang kreatif di atas, beberapa aktivitas sosial yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan inovasi sosial yang terjadi di Kota Bandung dalam matriks inovasi sosial sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Inovasi Sosial Kota Bandung

No	Inovator	Ide-ide Baru (Jasa, Produk, Model)	Kolaborasi	Keterangan/Gambar
1	Pemerintah (Pemkot Bandung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Kominfo Bandung)	Command Center (Sistem Pelayanan Publik terintegrasi dan Pusat data informasi)	Pemkot Bandung, Polri, Masyarakat	
		Datathon Bandung (Kompetisi Inovasi Pemanfaatan Data Terbuka milik pemerintah)	Pemkot Bandung, City of Melbourne, SBM ITB, Masyarakat.	
		Teknologi Tepat Guna (Pemberdayaan dalam menciptakan teknologi tepat guna)	Posyantek melalui DP3A, Kecamatan, Masyarakat	
		Literasi Digital (Model Pembelajaran):	RTIK melalui Kominfo, Universitas, Masyarakat	
2	Komunitas (Bandung Creative City Forum, Indonesia Creative Cities Network, Common Room, Bussiness Initiative Movement)	Platform Kreatif	Pemkot Bandung, Universitas, Masyarakat	
		Platform Diskusi Platform Bisnis (Ketiga platform ini menjadi wadah alternatif bagi warga Bandung dalam berinovasi)		
3	Masyarakat (Rachmat Jabaril, Rilly Robbi Gusadi)	Kampung Kreatif (Pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi kampung)	BCCF, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Masyarakat	
		The Hallway (Creative Space): - Distro - Coffe Shop - Food and Beverage - Crafts - Dan lain-lain.	Pemkot, UMKM, Masyarakat	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa inovator baik pemerintah, komunitas maupun warga kota mampu menghasilkan gagasan, kebijakan, atau bahkan produk yang relevan dengan implementasi kota cerdas. Inovator-inovator tersebut dengan inovasi yang dihasilkan memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan efektifitas implementasi kota cerdas di Kota Bandung terutama melalui kolaborasi di antar inovator. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2 tersebut, inovasi dari pemerintah dapat berkembang dan bermanfaat ketika mengikutsertakan keterlibatan aktif komunitas dan warga kota pada umumnya. Begitupun sebaliknya, inovasi yang lahir dari akar rumput dapat berkembang ketika mendapatkan dukungan dari pemerintah kotanya. Namun demikian, meskipun jelas terlihat peran dari masing-masing inovator melalui produk yang dihasilkan, hal itu belum secara eksplisit tertuang dalam rencana induk kota cerdas di Kota Bandung sehingga hasil matriks *power* dan *interest* menunjukkan bahwa implementasi kota cerdas Kota Bandung bersifat top down sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Matriks inovasi sosial pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai aktor menjadi syarat penting terbentuknya sebuah inovasi yang bersifat sosial. Sebagaimana telah diketahui bahwa inovasi sosial merujuk pada hubungan sosial yang berujung pada kolaborasi antar sektor. Dari Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa inovasi-inovasi yang dihasilkan mewujud pada berbagai jenis inovasi sosial baik yang bersifat lebih teknologi, ekonomi, maupun kultural. Meskipun demikian, keseluruhan bentuk-bentuk inovasi sosial yang digambarkan Tabel 2 telah memenuhi unsur kota cerdas yang holistik yakni mencakup teknologi, regulasi, dan aktor. Namun demikian, dalam konteks kota cerdas di Bandung, agaknya masih cenderung menempatkan aktor di akar rumput (organisasi dan komunitas) sebagai penerima manfaat dan cenderung mengedepankan produk-produk dan layanan yang terdigitalisasi. Matriks pada Tabel 2 dalam hal ini dapat menjadi refleksi dan jawaban sementara bahwa Kota Bandung dalam mengimplementasikan kota cerdas yang lebih relevan dengan kondisi warganya.

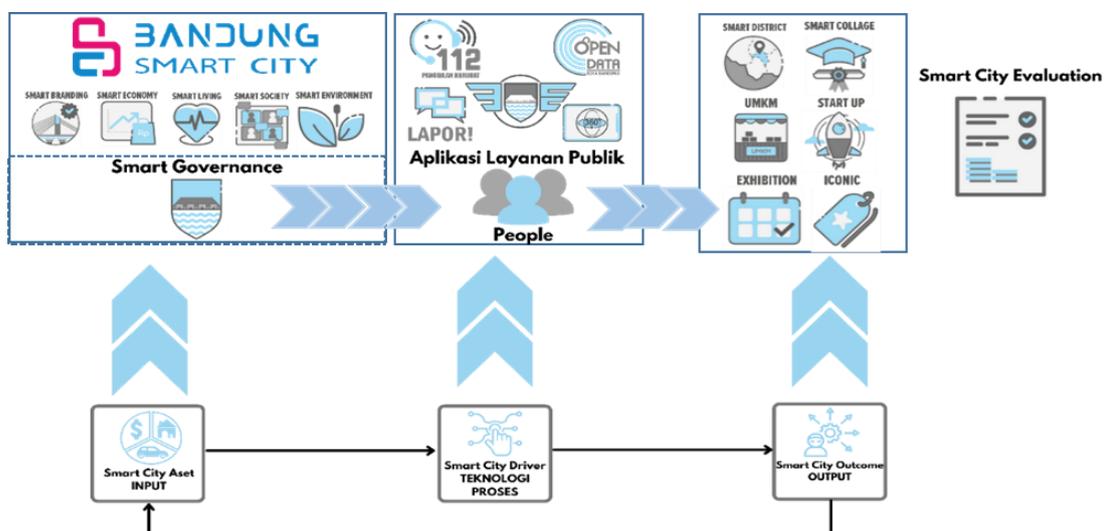
3.4. Rekomendasi Alur Berpikir Bandung Kota Cerdas berbasis Masyarakat Cerdas

Merujuk Lara et al. (2016: 10), kota cerdas adalah “komunitas yang secara sistematis mempromosikan kesejahteraan untuk semua anggotanya, dan cukup fleksibel untuk proaktif dan berkelanjutan menjadikan tempat yang semakin baik untuk hidup, bekerja dan bermain”. Pemikiran ini menjadi pondasi dalam pendefinisian kota cerdas yang bertumpu pada komunitas. Definisi Kota Cerdas tersebut secara implisit mengadung makna pembangunan inklusif. Artinya, kota cerdas seyogianya dirasakan manfaatnya oleh seluruh warganya dan tidak ada yang termarginalkan dari kebijakan dan program kota cerdas tersebut. Kota cerdas dalam hal ini harus dapat menjamin lebih akses dan jati diri komunitas-komunitas yang ada di kota tersebut.

Definisi kota cerdas tersebut diharapkan mampu memfokuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan kota cerdas yang lebih komprehensif dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. Masyarakat dalam konteks kebijakan kota cerdas ini diharapkan mampu menjadi—apa yang disebut Foth (2018) sebagai *co-creator*. Dalam konteks pembangunan, maka *co-creator* berarti bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan itu sendiri yang berperan aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya.

Namun demikian, berdasarkan data dan analisis yang telah dijabarkan di atas, Bandung kota cerdas cenderung memiliki fokus terhadap *smart governance* dan pelayanan publik. Kedua hal itu, yakni *smart governance* dan layanan publik nampaknya memang menjadi fokus implementasi kota cerdas di beberapa kota/kabupaten di Indonesia. Bagi Kota Bandung sendiri, perhatian lebih terhadap *smart governance* dianggap sebagai pondasi bagi elemen-elemen *smart* lain di dalam kota cerdas. Bagi Kota Bandung, pemerintahan yang cerdas merupakan gerbang awal untuk efektifitas implementasi kota cerdas terutama dalam hal memberikan manfaat kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan publik. Untuk itulah, Pemerintah Kota Bandung terkait dengan *smart governance* tadi, berupaya untuk mengumpulkan dan memanfaatkan *big data*. Diskursus mengenai data di dalam era informasi dan juga tren kota cerdas memang menjadi hal penting untuk diperhatikan. Hal itu tentu diarahkan guna menciptakan pelayanan bagi masyarakat yang tepat—efektif dan efisien. Dengan kata lain, kebijakan atau program Bandung Kota Cerdas

dapat dikatakan sebagai kebijakan atau program yang berbasis data. Namun demikian, posisi masyarakat dalam konteks ini cenderung sebagai penerima manfaat semata. Hal itu dapat dilihat dengan mengurainya menggunakan kerangka berpikir Yigitcanlar (2018) sebagaimana Gambar 10.

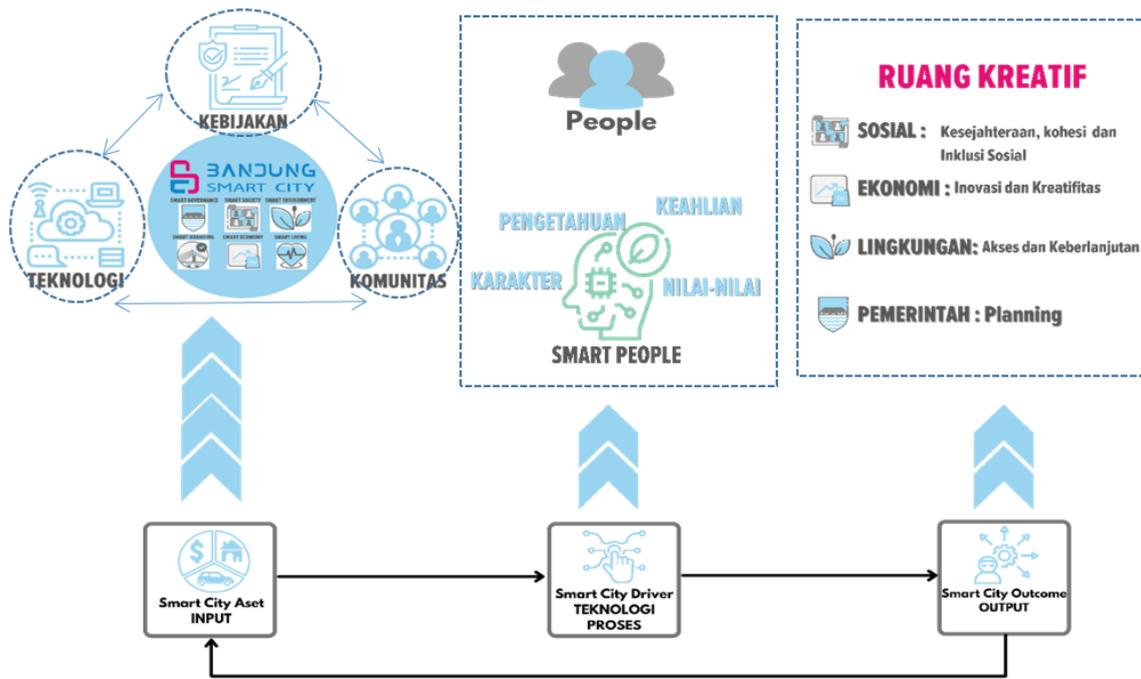


Sumber: Analisis penulis, 2021, Diadaptasi dari Yigitcanlar, 2018

Gambar 10. Alur Berpikir Bandung Kota Cerdas

Berdasarkan kerangka berpikir yang ditawarkan Yigitcanlar (2018) dan analisis oleh penulis, terlihat bahwa Kota Bandung mencoba memposisikan berbagai elemen *smart* di dalam kota cerdas sebagai Aset kota cerdas (*smart city assets*)—Input. Pada prosesnya (berkaitan dengan penggerak kota cerdas), teknologi menjadi penggerak utama. Di samping itu, fokus yang lebih besar terhadap teknologi tersebut dikaitkan dengan penerapan *smart governance*. Cara yang dilakukan adalah menciptakan dan mengintegrasikan berbagai data untuk menciptakan berbagai layanan publik berbasis IoT—aplikasi maupun web. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan, bahwa masyarakat (sebagai salah satu penggerak) menjadi kurang signifikan ketika posisinya sebatas pada penerima manfaat semata dari berbagai program Kota Cerdas. Padahal geliat-geliat kreasi dan inovasi di Kota Bandung tidak jarang berasal dari level akar rumput. Kemudian, sebagai hasil akhir yang diharapkan, selain tentu saja efektifitas dan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi, Bandung Kota Cerdas mengupayakan hal yang lebih besar seperti terciptanya ruang-ruang kreatif masyarakat (ICONIC) serta ekosistem teknologi digital terpadu (Bandung Sillicon Valley).

Dengan melihat alur berpikir dari Bandung Kota Cerdas di atas secara menyeluruh, penulis merasa masih terdapat sedikit gap dalam logika input-proses-output-nya. Jika merujuk Yigitcanlar (2018), maka ketiga penggerak (teknologi, regulasi, dan aktor (masyarakat)) itu sendiri merupakan *smart city assets* atau *input* daripada kota cerdas. Lebih penting lagi, ketiga penggerak utama tersebut memiliki posisi yang sama-sama penting dan saling berinterelasi satu sama lain. Dalam konteks Bandung Kota Cerdas—sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa gap di dalam interelasi ketiga komponen tersebut. Hal itu terutama berimplikasi pada kurangnya memaksimalkan proses pembentukan masyarakat cerdas di Kota Bandung dalam konteks kota cerdas mereka. Pada gilirannya, hal itu juga berimplikasi kurang diafirmasinya potensi modal sosial budaya (elemen kultural) ke dalam kebijakan atau program (elemen kultural) kota cerdas yang dibuat. Dengan demikian, secara kritis, hasil yang diharapkan dari kota cerdas mungkin tidak relevan atau berbeda dari masalah maupun imajinasi masyarakat sehingga manfaatnya kurang bisa dirasakan. Rekomendasi sementara yang dapat penulis tawarkan, adalah alur berpikir alternatif untuk merumuskan kota cerdas berbasis masyarakat di Kota Bandung sebagaimana ditampilkan Gambar 11.



Sumber: Analisis Penulis, 2021, Diadaptasi dari Yigitcanlar, 2018
Gambar 11. Alur Berpikir Alternatif Bandung Kota Cerdas

Untuk menghindari gap sebagaimana dimaksud di atas, maka identifikasi terhadap ketiga *driver* kota cerdas perlu dilakukan lebih cermat dan berimbang. Hal itu guna tidak terjebak pada kota cerdas yang lebih determinan teknologi. Di sisi lain, hal itu juga dilakukan dalam rangka agar kota cerdas tidak keluar dari konteksnya yang mana sangat berkaitan dengan teknologi digital, *IoT*, *AI*, dan lain sebagainya. Ketika masyarakat cerdas dijadikan sebagai basis dari kota cerdas, maka unsur *people* (aktor manusia dalam struktur apapun) sudah sepantasnya bukan hanya menjadi tujuan, melainkan juga proses. Peningkatan kapasitas dilakukan dalam berbagai strategi yang tepat guna mentransformasikan *people* menjadi *smart people*. Peningkatan kapasitas itu sendiri merupakan proses meningkatkan bukan hanya pengetahuan dan keahlian, tetapi juga karakter dan nilai-nilai. Artinya, ada upaya untuk mengafirmasi potensi modal sosial budaya dan potensi lokal Kota Bandung.

Kota Bandung tentu memiliki karakteristik dan keunikannya sendiri yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Upaya afirmasi tadi bertujuan menggali beragam bentuk masalah dan potensi serta harapan dari sudut pandang yang berbeda-beda di tingkat lokal. Karena bagaimanapun, apa yang menjadi perhatian bagi sebagian orang, belum tentu menjadi perhatian bagi sebagian orang yang lain. Untuk itulah, mensintesis berbagai keterkaitan, perspektif, dan batasan dari berbagai pihak akan berguna dalam merumuskan output kebijakan atau program kota cerdas yang lebih tepat sasaran bagi Kota Bandung.

Berkenaan dengan hasil yang diharapkan (*desired outcome*) dalam kerangka Yigitcanlar (2018), maka dimensi-dimensi yang ada (sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan) perlu dikontekstualisasikan dengan cermat. Hasil apa yang sekiranya memang relevan bagi Kota Bandung dengan berbagai potensi dan masalahnya. Jika peningkatan kapasitas merupakan upaya pembentukan masyarakat cerdas (*smart people*), maka menghasilkan ruang-ruang kreatif (sebagai wadah) dalam berbagai bentuk menjadi bijak untuk dirumuskan. Kolaborasi antar berbagai *stakeholder* menjadi salah satu syarat penting dalam mewujudkan hal tersebut karena kolaborasi berarti bukan hanya sekedar menyatukan berbagai sudut pandang, tetapi juga sumber daya.

4. KESIMPULAN

Permasalahan utama dalam agenda pengembangan Bandung Kota Cerdas adalah adanya gap di dalam interelasi ketiga komponen penggerak utama kota cerdas. Berkenaan dengan itu, posisi komunitas khususnya, cenderung ditempatkan sebagai penerima manfaat semata. Kemunculan inovasi sosial yang berasal dari aktor lokal masih bersifat sporadis serta potensi sosial budaya kurang maksimal diafirmasi ke dalam program kota cerdas. Inovasi sosial di Kota Bandung sebagaimana dijabarkan mungkin menjadi tidak relevan dalam konteks kota cerdas ketika tidak berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Namun bagaimanapun inovasi sosial yang ditampilkan dapat dimaksimalkan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Penciptaan ruang-ruang kreatif yang menjadi rekomendasi sementara dalam penelitian ini masih belum menemukan bentuknya yang konkret. Penggalian masalah dan potensi dari sudut pandang akar rumput masih perlu untuk ditindaklanjuti. Berkenaan dengan itu, pendekatan pembangunan yang lebih bersifat sosial serta metode riset aksi mungkin diperlukan untuk merumuskan berbagai bentuk ruang kreatif yang relevan bagi tiap kelompok masyarakat. Kolaborasi antar stakeholder juga menjadi signifikan dalam mencapai hal tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan pembentukan formasi jaringan sosial dapat berguna untuk mengurai dan menyeleraskan tujuan tersebut.

5. PERNYATAAN RESMI

Artikel ini merupakan hasil penelitian tim perkotaan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya - LIPI yang dibiayai oleh Dana Prioritas Riset Nasional (PRN) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang saat ini sudah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tim penelitian tersebut beranggotakan Prof. Dr Henny Warsilah, DEA sebagai koordinator, Dr. Galuh Syahbana Indrapahasta, Dra. Rochmawati, Praditya Mer Hananto, M.Krim, Yoka Pramadi, M.I.kom, dan Rusydan Fathy, S.Sos. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LIPI/BRIN, Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Pemerintah Kota Bandung, dan seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini sehingga artikel ini bisa dirampungkan.

6. REFERENSI

- Avelino, F. Et al. (2019). Transformative Social Innovation and (dis)empowerment. *Technological Forecasting & Social Change*, 145 (2019), 195-206.
- Castells, M. (1989). *The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process*. Oxford: Basil Blackwell.
- Castells, M. (1990). *The Informational City: A New Framework for Social Change*. Research Paper 184: The City in the 1990s Series Lecture 3. Lecture delivered in the series *The City in the 1990s: Livable for Whom?* Centre for Urban and Community Studies University of Toronto.
- Castells, M. (1996). *The Rise of Network Society*. Wiley-Blackwell, UK.
- Firman, T. (2009). The Continuity and Change in Mega-Urbanization in Internasional: A orang of Internasional–Bandung Region (JBR) Development. *Habitat Internasional*, 33(4), 327–339.
- Foth, M. (2018). Participatory Urban Informatics: Towards Citizen-Ability. *Smart and Sustainable Built Environment*, 7(1), 4-19. <https://doi.org/10.1108/SASBE-10-2017-0051>.
- Fuady, M. A. K., Fuady, M., & Dewi, C. (2021). Sinergi Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Konsep Kota Banda Aceh sebagai Islamic Smart city. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(3), 327-333. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i3.36526>.
- Hasanuddin, D. Z. E. (2021). Kota Cerdas Untuk Siapa? Studi Kasus Kanal Partisipasi Warga Medan, Orang, dan Surabaya. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(2), 214-229. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.36541>.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Penerbit Salemba Humanika.
- Iwamoto, H. K & Airton, C. C. (2020). Social Innovation: Emancipation or More of the Same? *Emancipação, Ponta Grossa*, 20, 1-21,

- Kota Bandung. (2008). Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung tahun 2005-2025. Pemerintah Kota Bandung: Bandung.
- Kota Bandung. (2011). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031. Pemerintah Kota Bandung: Bandung.
- Kota Bandung. (2018). Peraturan Wali Kota Bandung No. 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Master Plan Bandung Smart City) Periode 2018-2023. Pemerintah Kota Bandung: Bandung.
- Kota Bandung. (2019). Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung tahun 2018-2023. Pemerintah Kota Bandung: Bandung.
- Lara, A. P. et.al. (2016). Smartness that Matters: Towards a Comprehensive and Human-Centred Characterisation of Smart Cities. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 2(2).
- Lisetchi, M. & laura Brancu. (2014). The Entrepreneurship Concept as a Subject of Social Innovation. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 124 (2014), 87-92.
- Mora, L. et.al. (2019). Smart City Development ICT Innovation for Urban Sustainability. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89474-4_6.
- Portales, L. 2019. Social Innovation and Social Entrepreneurship: Fundamentals, Concepts, and Tools. Springer.
- Provinsi Jawa Barat. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Bandung.
- Provinsi Jawa Barat. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Bandung.
- Provinsi Jawa Barat. (2020). Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Bandung.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... Stringer, L. C. (2009). Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. doi:10.1016/j.jenvman.2009.01.001
- Schmeer, K. (2000). "Stakeholder Analysis Guidelines," in Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform, 2000.
- Slabá, M. (2014). Stakeholder Power-Interest Matrix and Stakeholder-Responsibility Matrix in Corporate Social Responsibility. *Proceeding of 8th International Days of Statistics and Economics*, 1366-1374.
- Tarigan, A. K. M., Sagala, S., Samsura, D. A. A., Fiisabiilillah, D. F., Simarmata, H. A., & Nababan, M. (2016). Bandung City, Indonesia. *Cities*, 50, 100–110. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.09.005>
- Voskuil, R. P. G. A. (2007). Bandung, Citra Sebuah Kota (Bandung, Image of a City), Bandung, Department of City and Regional Planning, Bandung: Institut Teknologi Bandung and PT. Jaggadhita.
- Wigboldus, S. 2016. Ten Types of Social Innovation – a Brief Discussion Paper. <https://www.researchgate.net/publication/315837903>
- Yigitcanlar. (2018). Understanding Smart Cities: Intertwining Development Drivers with Desired Outcomes in a Multidimensional Framework. *Cities*. Elsevier, pp. 145–160.
- Yin R. (2018). Case Study Research and Application: Design and Methods. Sage Publisher.